



Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Dampaknya terhadap Kondisi Hutan di Kelompok HKm Buli Uher, Kabupaten Sikka

(Evaluation of Community Forest Management (HKm) and It's Impact on Forest Condition in the Buli Uher HKm Forestry Group, District Sikka Regency)

Susian Naomi Padama, Astin Elise Mau¹, Pamona Silvia Sinaga², Norman P. L. B. Riwu Kaho³
^{1,2,3}*Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana, Kupang, 85228, Indonesia*

Diterima: 19 Agustus 2024, Direvisi: 03 Oktober 2024, Disetujui: 31 Desember 2024

DOI: 10.31849/forestra.v20i1.22299

Abstract

The aims of evaluation of the community forest management of HKm Buli Uher, Ilinmedo Village, Waiblama District, Sikka Regency to observe and assess the implementation of HKm. The method used mixed method between qualitative and quantitative methods. The results of the quantitative method were a scoring evaluation of HKm management, which is based on the weight of several variables, including institutional, community empowerment, HKm area governance, and HKm business governance, as well as data collection on land cover analysis and vegetation analysis. A simple random sample is the first step method in the vegetation analysis process, and a line transect is subsequently used. Meanwhile, the qualitative method is information or data from interviews, observations, and documents related to the management of Buli Uher HKm. The results showed that the management of the Buli Uher HKm in Ilinmedo Village received an assessment with good criteria. In the meantime, the Ilinmedo Protected Forest in HKm Buli Uher experienced a notable reduction in forest conditions in 2023, according to the results of a vegetation study and land cover changes, with vegetation that is changing after being damaged. It happened as a result of the community's logging and forest burning to make way for farming.

Keywords : Evaluation of management, community forests, forest conditions.

Abstrak

Evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan HKm Buli Uher Desa Ilinmedo Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka ini bertujuan menilai pelaksanaan HKm. Metode yang digunakan ialah *mixed methods* antara metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dari hasil skoring evaluasi pengelolaan HKm yang didasari pada bobot beberapa variabel antara lain kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, tata kelola kawasan HKm, dan tata kelola usaha HKm, serta pengumpulan data analisis tutupan lahan dan analisis vegetasi. Metode yang digunakan dalam analisis vegetasi yaitu dengan *start simple random sampling* dan selanjutnya menggunakan *line transect*. Sedangkan untuk metode kualitatif yaitu informasi atau data wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen terkait pengelolaan HKm Buli Uher. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan HKm Buli Uher di Desa Ilinmedo mendapatkan penilaian dengan kriteria baik. Sedangkan hasil analisis perubahan tutupan lahan dan analisis vegetasi, kondisi hutan di Hutan Lindung Ilinmedo di HKm Buli Uher mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2023 dengan vegetasi dalam tahap perbaikan dari kerusakan akibat penebangan dan pembakaran hutan yang dilakukan masyarakat untuk membuka lahan garapan.

Kata Kunci : Evaluasi pengelolaan, hutan kemasyarakatan, kondisi hutan.



I. PENDAHULUAN

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari di hutan negara yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sainul Sanjaya, 2022). Sistem perhutanan sosial menjadi salah satu bantuan nyata dari pihak pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses ke wilayah hutan negara atau hutan adat. Dalam pengelolaan hutan Indonesia, pengelolaan hutan berbasis masyarakat juga dikenal sebagai PHBM, adalah salah satu jenis program perhutanan sosial yang telah berkembang (Hakim *et al.*, 2010) dalam (Sainul Sanjaya, 2022).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi dasar hukum pengelolaan hutan di Indonesia, termasuk perhutanan sosial. Pasal 33 menyebutkan bahwa masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan mendefinisikan perhutanan sosial sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah salah satu dari lima skema perhutanan sosial tersebut. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014, HKm adalah hutan negara yang tujuan pemanfaatannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor 356/HK/2013 tanggal 4 Oktober 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) diberikan kepada Kelompok Perhutanan Sosial Hutan Kemasyarakatan (KPS HKm) Masyarakat Adat Buli Uher, Desa Ilinmedo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka dengan nama KPHKM Buli Uher. Melalui izin ini, pemerintah berusaha mendorong komunitas di

sekitar hutan, di mana 99% orang bekerja sebagai petani (KPH Sikka, 2013). KPHKM Buli Uher terbentuk dengan beranggotakan 90 orang dengan luas areal yang diperoleh KPHKM Buli Uher yaitu 498,40 hektar (KPH Sikka, 2023).

Berdasarkan hasil informasi pada survei awal, pemanfaatan hutan pada KPHKM Buli Uher mengakibatkan permasalahan dan perubahan kondisi hutan dimana masyarakat membuka lahan untuk menanam tanaman semusim seperti jagung dan padi. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang tidak memahami dan belum adanya pendampingan dari dinas kehutanan. Dengan menggunakan areal kerja HKm sebagai skema hak guna pakai dan bukan hak milik, komunitas anggota KPHKM Buli Uher menjadi mitra pemerintah. HKm didirikan untuk membantu masyarakat di dalam dan di sekitar hutan untuk melestarikan hutan (KLHK, 2014).

Sama seperti pada penelitian Nandini (2013) pengelolaan kelompok HKm pada aspek kelembagaan tidak terdapatnya pendampingan HKm secara utuh dan hanya dilakukan pada awal kegiatan. Sehingga menimbulkan permasalahan, kurangnya sumberdaya manusia yang tepat sebagai pengurus kelembagaan pun menjadi faktor ketidak berhasilan kelembagaan HKm di Pulau Lombok.

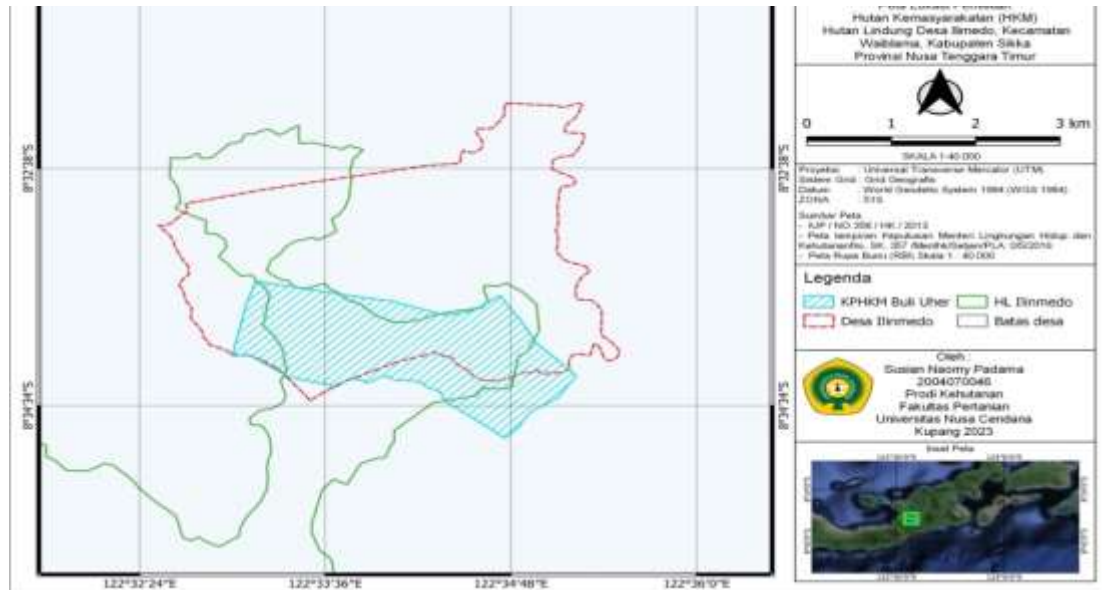
Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu adanya evaluasi terhadap HKm dengan penelitian mengenai "Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Dampaknya Terhadap Kondisi Hutan di Kelompok Perhutanan HKm Buli Uher, Desa Ilinmedo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka". Tujuan Penelitian ini yaitu: (1) Mengetahui kinerja pengelolaan KPHKM Buli Uher; (2) Mengetahui pengaruh pengelolaan hutan kemasyarakatan pada kondisi Hutan Lindung Ilinmedo.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Studi ini dilakukan di Desa Ilinmedo, yang terletak di Kecamatan Waiblama,

Kabupaten Sikka, dan berlangsung dari bulan April hingga Mei 2024.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

2.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, perekam suara, kamera, laptop, *software Arcgis*, tali, *phiband*, meter rol, hoga meter, dan *tally sheet*.

Adapun bahan yang digunakan adalah kuesioner, peta lokasi penelitian, citra satelit landsat 9, dan *microsoft excel*.

2.3 Metode Pengambilan Data

2.3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode gabungan (*mixed methods*) yang mengkombinasikan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap, valid, *reliable*, dan objektif (M. Iqbal, 2020).

Hasil dari skoring evaluasi pengelolaan merupakan data kuantitatif dari penelitian ini, dengan berdasarkan bobot aspek dalam kuesioner untuk mengukur (Nandini, 2013). Skoring merupakan sistem yang didasari pada bobot masing-masing aspek

dalam dan perhitungan INP kerapatan, dominansi, frekuensi dan indeks. Data kualitatif penelitian ini adalah informasi data wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen terkait pengelolaan KPHKm Buli Uher.

2.3.2 Sumber Data

Data primer dikumpulkan dari wawancara narasumber dan total skoring dari instrumen monev, observasi, analisis vegetasi dan analisis tutupan lahan. Sementara data sekunder berasal dari data-data teknis atau dokumen mengenai pengelolaan KPHKm yang diperoleh dari instansi terkait.

2.3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu hasil skoring evaluasi dan hasil analisis vegetasi sedangkan metode kualitatif yaitu observasi, wawancara, studi dan dokumentasi.



2.4 Penarikan Sampel

2.4.1 Penarikan Sampel Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel *purposive sampling*, yang memungkinkan responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu (Lenaini, 2021).

Sasaran penelitian meliputi *stakeholder* dan masyarakat yang berjumlah 48 anggota dari total 90 anggota KPHKm Buli Uher. 49 anggota merupakan informan untuk memperoleh data kualitatif. Batas eror yang digunakan dalam penarikan sampel ini yaitu 10% dari total populasi dengan menggunakan rumus slovin (Rizki Sanjaya, 2016).

2.4.2 Penarikan Sampel Analisis Vegetasi

Metode *simple random sampling* dan *line transek* digunakan untuk mengumpulkan data vegetasi. Sampling dilakukan dengan jarak antar plot 100 meter persegi, dengan intensitas sampling sebesar 1% dari luas total 498,40 ha. Menurut Asyari (2022) intensitas sampling dapat ditentukan sebelum pelaksanaan pengukuran di lapangan. Jika citra landsat tersedia, maka intensitas sampling yang didapat yaitu 0,1%.

Jumlah plot yang dihitung dengan menggunakan rumus yang ditemukan oleh Indriyanto (2006) dalam Rulianto (2018) :

- a. Luas areal hutan : 498,40 Ha
- b. Intensitas sampling (IS) : 1% = 0,01

c. Luas petak ukur : $20m \times 20m = 400 m^2 = 0,04 Ha$

d. Jarak antar plot : 100m = 0,01 Ha

Luas total plot yang diamati = $IS \times L = 0,01 \times 498,40 Ha = 4,98 Ha$

Plot total = luas petak ukur / (luas petak \times jarak antar plot) = $4,98 / (0,04 \times 0,01) = 12,4 = 12$ plot

Dengan demikian, jumlah plot yang dibuat pada lokasi penelitian yaitu sebanyak 12 plot.

2.5 Metode Analisis Data

2.5.1 Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PHBM

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pedoman monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) (Dwi Sudarsono, 2016). Data mengenai anggota KPHKm Buli Uher ditabulasi dan dianalisis menggunakan sistem skoring dengan pembobotan variabel sesuai pertanyaan kuesioner. Variabel kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, tata kelola wilayah HKm, dan tata kelola usaha HKm.

Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian skoring pada variabel maka dapat dilakukan penilaian secara umum pada KPHKm Buli Uher yang didasari kriteria adaptasi panduan monev (Dwi Sudarsono, 2016) dan membuat kategori nilai.

Table 1. Kriteria dan Kategori Nilai Evaluasi KPHKm

No	Kriteria	Kisaran Nilai	Kategori Nilai				
			Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1	Kelembagaan	0-175	141-175	106-140	71-105	36-70	0-35
2	Pemberdayaan Masyarakat	0-125	101-125	76-100	51-75	26-50	0-25
3	Tata Kelola Kawasan HKm	0-175	141-175	106-140	71-105	36-70	0-35
4	Tata Kelola Usaha HKm	0-200	161-200	121-160	81-120	40-80	0-40
Kisaran Nilai Total		0-675	544-675	409-540	274-405	138-270	0-140



2.5.2 Analisis Perubahan Tutupan Lahan

Perubahan tutupan lahan dapat diamati pada interval waktu yang lebih lama, seperti lima atau sepuluh tahun dikarenakan adanya perubahan secara signifikan membutuhkan waktu yang terbilang cukup lama untuk terjadi. Analisis tutupan lahan dilakukan dengan menggunakan sistem informasi geografis dan penginderaan jauh, khususnya menggunakan gambar landsat 9 dari *website United States Geological Survey (USGS)*. Setelah data dikumpulkan, koreksi radiometrik dan koreksi geometrik dilakukan sebelum digitasi tutupan lahan pada tahun 2013, 2018, 2023, serta peta lokasi penelitian. Sumber data akan dikelola menggunakan *ArcGis*.

2.5.3 Analisis Vegetasi

Tujuan pengumpulan data untuk penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis vegetasi yang ada. Untuk melakukan analisis vegetasi hutan rumus-rumus berikut dapat digunakan:

1. Kerapatan (Km)

$$K_m = \frac{\text{Jumlah spesies}}{\text{Luas petak contoh}}$$

2. Kerapatan Relatif (KR)

$$K_r = \frac{\text{Jumlah suatu spesies}}{\text{Jumlah kerapatan seluruh spesies}} \times 100\%$$

3. Frekuensi (F)

$$F_m = \frac{\text{Jumlah petak contoh yang diduduki spesies } i}{\text{Jumlah banyaknya petak contoh}}$$

4. Frekuensi Relatif (FR)

$$F_r = \frac{\text{Frekuensi mutlak spesies } i}{\text{Jumlah frekuensi seluruh spesies}} \times 100\%$$

Parameter dominansi dianalisis menurut Soerianegara *dalam* (Sari et al., 2018):

- 1) Dominansi Mutlak

$$D_m = \frac{\text{Domino mutlak spesies } i}{\text{Jumlah total luas petak contoh}}$$

- 2) Dominansi Relatif

$$D_m = \frac{\text{Domino mutlak spesies } i}{\text{Jumlah total luas petak contoh}}$$

- 3) Dominansi Relatif

$$D_m = \frac{\text{Frekuensi mutlak spesies } i}{\text{Jumlah dominansi seluruh spesies}} \times 100$$

Nilai Penting :

$$INP = K_r + F_r + D_r$$

Keterangan :

NP : Nilai Penting

Kr : Kerapatan relatif

Fr : Frekuensi relatif

Dr : Dominansi relatif

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Evaluasi PHBM di KPHKm Buli Uher

3.1.1 Keberhasilan Kelembagaan

KPHKm Buli Uher mempunyai kelengkapan dokumen nama-nama pengurus dan anggota yang lengkap, daftar hadir dan buku tamu, peran dan tanggung jawab yang jelas, juga adanya aturan-aturan kelompok termasuk dalam hal pergantian kepengurusan pengurus yang melakukan kesalahan. Namun kesalahan bisa ditolerir sebanyak 3x dengan memberikan peringatan, dan jika melampaui itu maka kelompok akan mengganti dengan pengurus baru secara musyawarah akan tetapi dalam perjalanan keaktifan kelompok sejak 2018 - 2024 belum ada pergantian kepengurusan yang disebabkan permasalahan atau pengurus kurang berkompeten.

Indikator ini mendapatkan skor penilaian yang tinggi (5) dan menghasilkan nilai dari masing-masing kriteria yaitu 25 (bobot \times skor). KPHKm Buli Uher juga rutin mengadakan pertemuan antara pengurus dan anggota setiap bulan untuk mengevaluasi setiap program dan membahas kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan kedepannya. Namun kegiatan dalam pencapaian Rencana Kerja Tahunan (RKT) kelompok HKm Buli Uher belum mencapai target sebesar 75% dan baru mencapai target 50%. Hal ini juga dipengaruhi oleh RKT KPHKm Buli Uher yang baru disusun pada tahun 2023 dan keberlangsungan kegiatan sebelumnya RKT dirujuk pada perencanaan lokal oleh pengurus dan anggota.

Hasil rata-rata dari penilaian variabel keberhasilan aspek kelembagaan dijumlahkan kemudian menghasilkan nilai rata-rata untuk setiap indikator dan menghasilkan nilai total



sebesar 150. Dengan demikian variabel kelembagaan KPHKm Buli Uher masuk ke dalam kategori sangat baik karena memiliki nilai total 141-175 sesuai dengan kriteria dan kategori nilai evaluasi.

Nandini (2013) menemukan hasil yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa aspek kelembagaan HKM di Pulau Lombok sangat buruk karena pendampingan hanya diberikan pada awal kegiatan dan dilepas ketika kelembagaan tidak dapat bertahan sendiri. Ketidakterhasilan lembaga HKM di Pulau Lombok disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia sebagai pengurus.

3.1.2 Pemberdayaan Masyarakat

Setelah evaluasi dan analisis data variabel pemberdayaan masyarakat, pada tabel 1 menunjukkan nilai total sebanyak 76. Nilai-nilai ini berada di antara 76-100 yang dapat dikategorikan baik. Berdasarkan data dari responden, kelompok HKM Buli Uher mendapatkan fasilitas instansi terkait (Balai PSKL Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), UPTD KPH Sikka ini berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan dimana terdapat *Forest Programme* (FP 5) dalam pengelolaan hutan yang dibiayai oleh pemerintah Jerman, program ini berlangsung dari tahun 2021-2027 dan KPHKm Buli Uher menjadi salah kelompok yang mendapatkan dana hibah dari pemerintah Jerman. Namun pendanaan dan fasilitas dari FP 5 baru diterima pada akhir tahun 2023. Fasilitas pembibitan yang dibeli oleh kelompok seperti Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti kenari dan gaharu, serta spesies tanaman hutan multiguna / *Multy Purpose Tree Species* (MPTS) seperti durian, pala, cengekeh, dan kopi.

Dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta pemasaran hasil evaluasi mendapatkan nilai nol (0), dikarenakan setiap anggota kelompok memasarkan hasil panen hanya pada pasar terdekat atau kepada pengumpul langganan secara gelondongan, sehingga belum ada distribusi hasil panen yang lebih luas.

Kelompok HKM baru merencanakan untuk melakukan pemasaran komoditi secara *online*, *offline*, dan bekerja sama dengan mitra yang difasilitasi oleh instansi. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh, anggota KPHKm sampai saat ini masih memasarkan secara *offline* dan tidak mendapatkan fasilitas yang mendukung untuk adanya pemasaran HHBK sesuai perencanaan. Namun pendampingan dari pemerintah ada, sehingga memperoleh penilaian yang maksimum (25), dalam hal ini melalui pendamping Perhutanan Sosial (PS) baik, pendamping rutin mengunjungi pengurus KPHKm Buli Uher dan pada saat rapat evaluasi, pendamping selalu ikut hadir. Hal ini menunjukkan bahwa hasil rata-rata dari penilaian variabel keberhasilan aspek pemberdayaan masyarakat dijumlahkan kemudian menghasilkan nilai rata-rata untuk setiap indikator dan mencapai nilai total sebesar 93. Variabel pemberdayaan masyarakat KPHKm Buli Uher memiliki nilai total antara 76 sampai 100, sehingga masuk ke dalam kategori baik.

Dalam studi pemberdayaan masyarakat pada pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKM) di Desa Pacekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Reski *et al.*, (2017), menemukan bahwa masyarakat Desa Pacekke sangat bergantung pada program pemerintah, modal, pasar dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Hal ini mengakibatkan posisi masyarakat dalam mitra yang rendah, kerusakan hutan yang meningkat sebagai akibat dari keterlibatan masyarakat yang kurang dalam pengelolaan hutan, dan kurangnya peran aparat pemerintah untuk mendorong pemberdayaan, yang mengakibatkan penggunaan sumber daya manusia yang kurang efektif. Karena kurangnya modal dan motivasi untuk berwirausaha, masyarakat juga kurang berminat dalam berwirausaha, yang mengakibatkan pendapatan masyarakat rendah.



3.1.3 Tata Kelola Kawasan HKm

Masyarakat khususnya anggota dan pengurus HKm mempunyai kesadaran dan kepedulian yang baik akan hutan yang lestari dilihat dari rata-rata penilaian indikator yang hampir semua mendapatkan nilai maksimum (25) dan tidak terdapat konflik pada kawasan antar masyarakat, begitupun dari segi usaha dan kerja sama antar masyarakat yang baik untuk tetap melestarikan lingkungan.

Adanya kendala atau konflik ditinjau dari sejarah HKm bahwa pada tahun 1984 pernah terjadi konflik antar masyarakat dan juga pemerintah atas pemasangan pilar. Hal ini menjadi tolak ukur dari responden dalam menilai adanya konflik dalam proses pengelolaan HKm ini, namun berdasarkan informasi yang didapatkan saat penelitian belum adanya konflik berat seperti perebutan lahan maupun konflik antar masyarakat/kelompok dalam penggarapan lahan pada kelompok selama 5 tahun terakhir pasca pengelolaan KPHKm. Oleh karena itu, nilai rata-rata untuk tujuh indikator tersebut digabungkan menghasilkan skor rata-rata 149, yang memenuhi kriteria dengan sangat baik karena memiliki nilai total antara 141-175.

Menurut penelitian Sulastri *et al.*, (2019) di Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, evaluasi pengelolaan HKm secara teknis rehabilitasi dan perlindungan blok budidaya dari perspektif sosial, ekonomi, dan ekologi ditunjukkan oleh dukungan pemerintah untuk mewujudkan hutan lestari keanekaragaman tanaman dan ketersediaan air di wilayah tersebut, serta peningkatan ekonomi masyarakat.

3.1.4 Tata Kelola Usaha HKm

Berdasarkan kelola usaha di kawasan KPHKm Buli Uher ini dapat dihasilkan berbagai macam hasil HHBK seperti Sagu/enu, jambu mente, kemiri, bambu. Dalam hal kelola bisnis, HHBK menjadi salah satu komoditi andalan pengelola KPHKm Buli Uher. Salah satu sumber pendapatan kelompok tani adalah keberadaan HHBK di kawasan KPHKm Buli Uher. Hasil evaluasi aspek tata

kelola usaha KPHKm Buli Uher didasarkan pada 8 indikator, pengurus kelompok usaha/koperasi, salah satunya menerima nilai rata-rata 0 hal ini dikarenakan KPHKm Buli Uher tidak mempunyai kelompok usaha bersama yang mengharuskan adanya kepengurusan di bidang usaha. Adanya pertemuan rutin anggota, memperoleh nilai rata-rata sebesar 0.

Dalam 12 bulan terakhir, kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan koperasi atau kelompok usaha yang dilakukan secara mandiri atau dengan pihak lain, selain pemerintah, memperoleh nilai rata-rata sebesar 25, kelompok mengadakan kegiatan pelatihan pengolahan umbi-umbian menjadi produk makanan masa kini (perkedel ubi talas, mie talas, bakso talas, aneka kue-kue) pada bulan juli 2023.

Dana usaha, yang merupakan modal kelompok atau koperasi, memperoleh nilai rata-rata 20, modal dana usaha yang dipersiapkan yaitu dari iuran kas rutin kelompok yang sampai saat ini berkisar antara 5-10 juta. Kelompok tersebut tidak memiliki produk pasca panen atau makanan olahan, nilai rata-ratanya adalah 0, dan setiap hasil panen masih dijual secara gelondongan tanpa diolah terlebih dahulu. Dalam proses pelatihan pengolahan umbi-umbian kelompok pernah menghasilkan produk tepung dan aneka kue namun belum terdapat pemasaran yang berkelanjutan dari produk yang dihasilkan dari pelatihan tersebut.

Namun, kelompok pasar hasil produksi memperoleh nilai rata-rata sebesar lima belas, yang menunjukkan bahwa penjualan masih dilakukan di lingkungan lokal, di pasar sekitar, atau ke pengumpul. Indikator (8) yang menunjukkan kontribusi hasil usaha untuk dana kelompok menerima nilai rata-rata 0. Akibatnya, jumlah nilai dari keseluruhan delapan indikator tersebut mencapai nilai total 84. Karena berada dalam rentang nilai total, tata kelola usaha HKm dinilai cukup baik dalam hal pengelolaan.



Sedangkan penelitian Sainul Sanjaya (2022) mendapatkan hasil kinerja pengelolaan dengan kriteria penilaian baik, namun pada variabel pemberdayaan masyarakat mendapatkan kriteria cukup baik dengan skor maksudnya 59 karena selama tiga tahun terakhir, dinas dan lembaga terkait tidak memberikan dukungan anggaran untuk memberikan bantuan kepada masyarakat antara 81-120 sesuai dengan kriteria dan kategori nilai evaluasi.

Berdasarkan uraian penilaian tata kelola usaha dari KPHKm Buli Uher, hasil penelitian dari Rizki Sanjaya, (2016) Di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, kegiatan pemasaran masyarakat termasuk dalam kategori sedang. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan menjual hasil panen mereka, seperti kopi, ke pengumpul atau pasar untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

3.1.5 Hasil Kinerja Pengelolaan KPHKm Buli Uher

Setelah evaluasi dan analisis data terkait pengelolaan HKm di KPHKm Buli Uher dapat diketahui variabel penilaian dengan hasil penilaian yang paling tinggi yaitu variabel tata kelola kawasan HKm dengan kriteria penilaian sangat baik (150), hal ini dikarenakan partisipasi dari masyarakat dan kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mengelola dan menjaga hutan tetap lestari. Pemahaman serta praktik pengelolaan hutan lestari yang baik dari anggota kelompok dan kerja sama antar masyarakat sekitar yang baik juga meminimalisasikan konflik atau kendala pada pengelolaan kawasan HKm. Penilaian kinerja pengelolaan KPHKm Buli Uher yang didasarkan pada empat variabel memperoleh nilai total sebesar 510 yang menunjukkan kinerja pengelolaan hutan kemasyarakatan di KPHKm Buli Uher baik.

Tabel 2. Hasil Kinerja Pengelolaan HKm di KPHKm Buli Uher

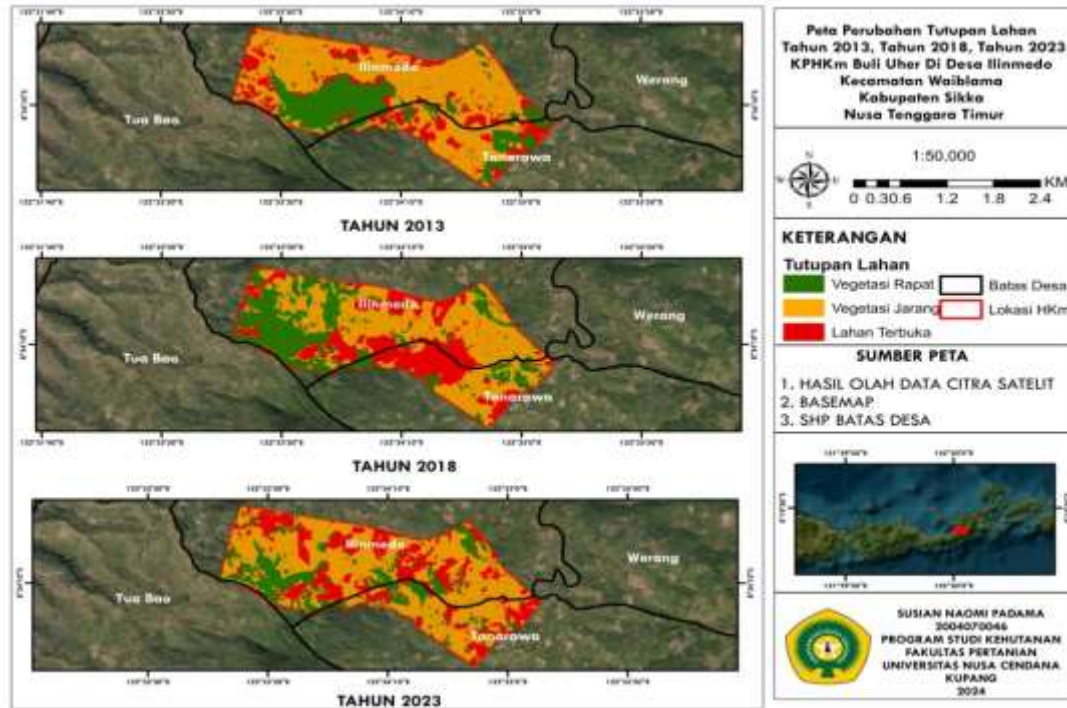
No	Variabel Penilaian	Hasil Penilaian	Kriteria Penilaian
1.	Kelembagaan	150	Sangat Baik
2.	Pemberdayaan Masyarakat	93	Baik
3.	Tata Kelola Kawasan HKm	149	Sangat Baik
4.	Tata Kelola Usaha HKm	84	Cukup Baik
Nilai Total Rata-rata		510	Baik

3.2 Kondisi Hutan Ilinmedo

3.2.1 Perubahan Tutupan Lahan

Perubahan tutupan lahan mencakup penggunaan lahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan fenomena alam. Perubahan tutupan lahan juga dapat mencakup

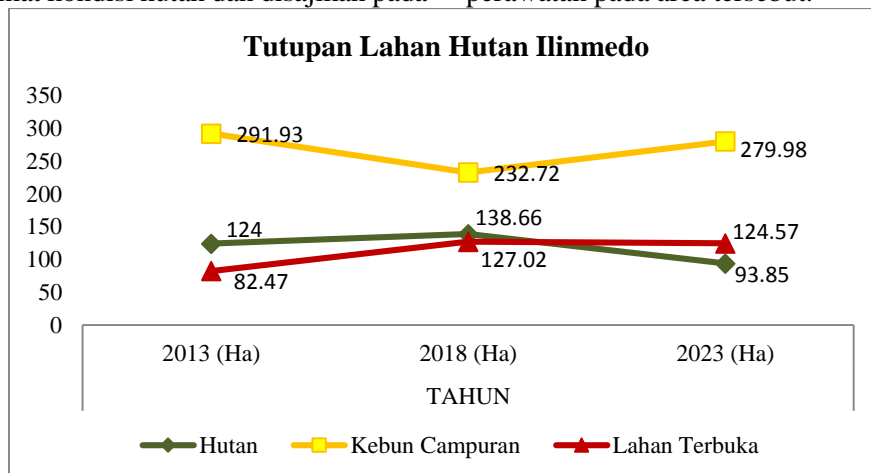
perubahan bentuk, lokasi, atau fungsi lahan selama berbagai waktu. Menurut Setiawan, (2020) faktor ekonomi paling sering berperan dalam perubahan tutupan lahan. Faktor sosial dan budaya, kebijakan pemerintah, dan suksesi juga berperan.



Gambar 2. Peta Perubahan Tutupan Lahan

Perubahan tutupan lahan umumnya memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengalami perubahan atau terjadinya perubahan. Interval waktu yang terjadi secara signifikan seperti dalam kurun waktu lima tahun. Perubahan tutupan lahan ini akan dianalisis pada tahun 2013, 2018, dan 2023 untuk melihat kondisi hutan dan disajikan pada

Gambar 2. SNI 7645 (2010) dalam Chandra, (2020) Penutupan lahan juga dapat berarti tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati yang disebabkan oleh pengaturan, aktivitas, dan perilaku manusia pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan produksi, perubahan, atau perawatan pada area tersebut.



Gambar 3. Grafik Luas Perubahan Tutupan Lahan



Kondisi Hutan Ilinmedo pada areal KPHKm Buli Uher mengalami perubahan yang berbeda-beda, pada gambar 2 menunjukkan perubahan kelas tutupan lahan hutan menjadi vegetasi jarang atau kebun campuran dan lahan terbuka. Hal ini disebabkan karena adanya aktivitas manusia yang berada di sekitar kawasan hutan maupun dalam kawasan salah satunya yaitu terbentuknya kelompok HKm.

Salah satu faktor yang menyebabkan perubahan penutupan lahan adalah ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan lahan untuk pertanian dan pemukiman (Tuakora, 2022). Tingginya tingkat kebutuhan penduduk menjadi alasan utama adanya karena tingginya tingkat kebutuhan penduduk, masyarakat sangat bergantung pada kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan untuk melakukan aktivitas pembukaan lahan intensif.

Kebutuhan akan lahan di dalam kawasan hutan mempengaruhi perubahan penutupan lahan di dalam kawasan hutan setelah mendapatkan IUPHKm. Kekurangan pengetahuan dan dukungan dari dinas dan lembaga terkait menyebabkan masyarakat membuka lahan, menanam tanaman secara bebas tanpa mengikuti peraturan, dan bahkan menebang pohon secara ilegal.

Hasil analisis perubahan tutupan lahan kebun campuran/vegetasi jarang tahun 2013, 2018, dan 2023 pada Gambar 2. menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai 2018 kebun campuran mengalami penurunan dan terjadi peningkatan pada tahun 2023 pasca kelompok HKm mengelola kawasan hutan dan terjadi aktivitas masyarakat di dalam kawasan yang kawasan hutan Lindung Ilinmedo. Keberadaan HKm menjadi kontribusi bagi masyarakat untuk memiliki akses kelola hutan dan lahan yang setara untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan pendapatan masyarakat, namun berdasarkan citra terhadap tutupan lahan di kawasan KPHKm Buli Uher, Hutan Lindung Ilinmedo tutupan lahan mengalami pengurangan dapat dilihat pada Gambar 2.

Penyebaran hutan alam menjadi kebun campuran adalah perubahan terbesar dalam

tutupan lahan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2, di mana sebagian besar kebun campuran (vegetasi jarang) berasal dari hutan (vegetasi tertutup). Tahun 2013 sampai 2018 tutupan lahan hutan mengalami peningkatan dari 124,00 Ha menjadi 138,66 Ha, hal ini disebabkan masyarakat baru mengelola kawasan hutan di tahun 2018 sejak perizinan HKm diberikan kepada kelompok pada tahun 2013. Sedangkan tahun 2023 terjadi penurunan tutupan lahan hutan yang sangat signifikan menjadi 93,85 Ha, ini diakibatkan karena banyak masyarakat yang menggarap lahan di semakin tinggi dengan meningkatnya luas kebun campuran pada tahun 2023 sebesar 279,98 Ha dengan sebagian besar kebun campuran berasal dari lahan hutan.

Sedangkan penggunaan lahan terbuka/semak belukar yang menunjukkan tipe penggunaan lahan dengan luas yang kecil dibandingkan dua tipe klasifikasi lainnya. Pada tahun 2013 sebesar 82,47 Ha, 2018 terjadi peningkatan yang signifikan mencapai 127,02 Ha, dan tahun 2023 sebesar 124,57 Ha ini terjadi karena tingginya aktivitas masyarakat dalam kawasan hutan, seperti adanya pembersihan lahan untuk penggarapan lahan, pembangunan gubuk untuk tempat peristirahatan sementara masyarakat.

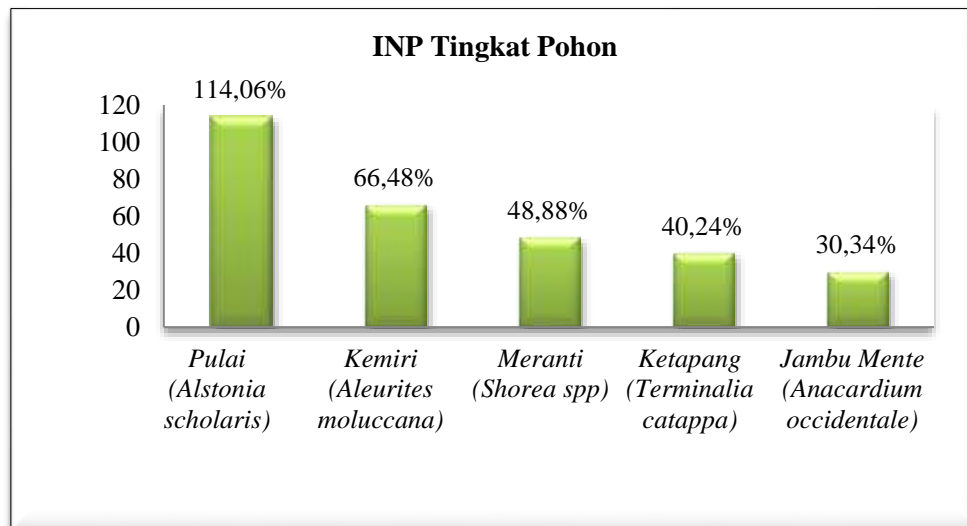
3.2.2 Hasil Analisis Vegetasi di KPHKm Buli Uher, Hutan Lindung Ilinmedo

1. Analisis Vegetasi Tingkat Pohon

Pada Gambar Grafik 6. menunjukkan hasil pengukuran tingkat pohon pada KPHKm Buli Uher, Hutan Lindung Ilinmedo didominasi oleh Pulai (*Alstonia scholaris*) dengan nilai INP Sebesar 114,06% disusul oleh Kemiri (*Aleurites moluccana*) dengan INP sebesar 66,48%, selanjutnya disusul Meranti (*Shorea spp*) dengan nilai INP 48,88% dan Ketapang (*Terminalia catappa*) dengan nilai INP 40,24%. Jenis tumbuhan yang memiliki nilai INP terkecil yaitu Jambu Mente (*Anacardium occidentale*) dengan nilai INP 30,34%, hal ini disebabkan karena daya adaptasi dengan lingkungannya untuk bertahan hidup yang kurang baik di Hutan Ilinmedo.

Namun, jenis yang memiliki INP tinggi lebih mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jenis yang memiliki INP tinggi merupakan jenis yang memiliki kemampuan

dalam menguasai wilayah khususnya dalam memanfaatkan sumber daya atau lebih mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya (Naiheli, 2022)



Gambar 4. Grafik INP Tingkat Pohon

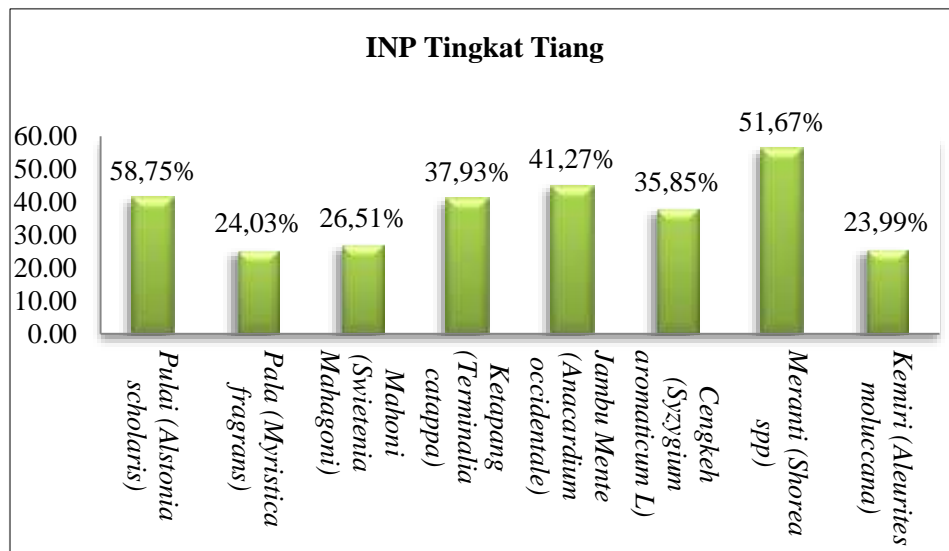
Menurut Warongan (2009) dalam Renta *et al.*, (2016) menyatakan bahwa indeks dominansi yang paling penting untuk diketahui adalah INP. Ini menunjukkan betapa pentingnya suatu jenis tumbuhan dan seberapa banyak dikuasainya dalam komunitas mangrove. Selain itu, indeks nilai penting menunjukkan seberapa besar pengaruh dan peran suatu jenis tumbuhan dalam komunitas mangrove. Dominansi Pulai (*Alstonia scholaris*) yang sangat tinggi lalu diikuti Kemiri (*Aleurites moluccana*) menunjukkan bahwa spesies ini mendominasi di Hutan Iinmedo secara signifikan, dan memberi pengaruh yang besar terhadap struktur serta fungsi ekosistem. Hal ini juga menunjukkan adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang kuat, namun kurangnya spesies yang dominan menunjukkan kondisi hutan yang sedang dalam tahap perubahan atau perbaikan dari kerusakan yang pernah terjadi pada tahun 2018 seperti penebangan dan kebakaran oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan.

2. Analisis Vegetasi Tingkat Tiang

Hasil analisis pada gambar 5 menunjukkan bahwa tingkat tiang pada KPHKm Buli Uher, Hutan Iinmedo didominasi oleh Pulai (*Alstonia scholaris*) dengan nilai INP terbesar yaitu 58,75% diikuti oleh Meranti (*Shorea spp*) dengan INP 51,67%, Jambu Mente (*Anacardium occidentale*) 41,27%, Ketapang (*Terminalia catappa*) 37,93%, lalu Cengkeh (*Syzygium aromaticum L*) dengan INP 35,85%, Mahoni (*Swietenia Mahagoni*) dengan INP 26,51%, Pala (*Myristica fragrans*) dengan INP 24,03%. INP yang terkecil adalah Kemiri (*Aleurites moluccana*) dengan besar INP 23,99%.

Menurut Soegianto (1994) dalam Idris *et al.*, (2023) menyatakan bahwa komunitas dengan banyak spesies memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi, tetapi komunitas dengan sedikit spesies dan hanya sedikit spesies yang dominan memiliki keanekaragaman jenis yang rendah. Adapun nilai INP yang besar pada Pulai (*Alstonia scholaris*) dikarenakan spesies ini memiliki

kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hutan dan mengalami regenerasi karena merupakan tanaman yang memiliki INP tertinggi dalam tingkat pohon maupun tiang.



Gambar 5. Grafik INP Tingkat Tiang

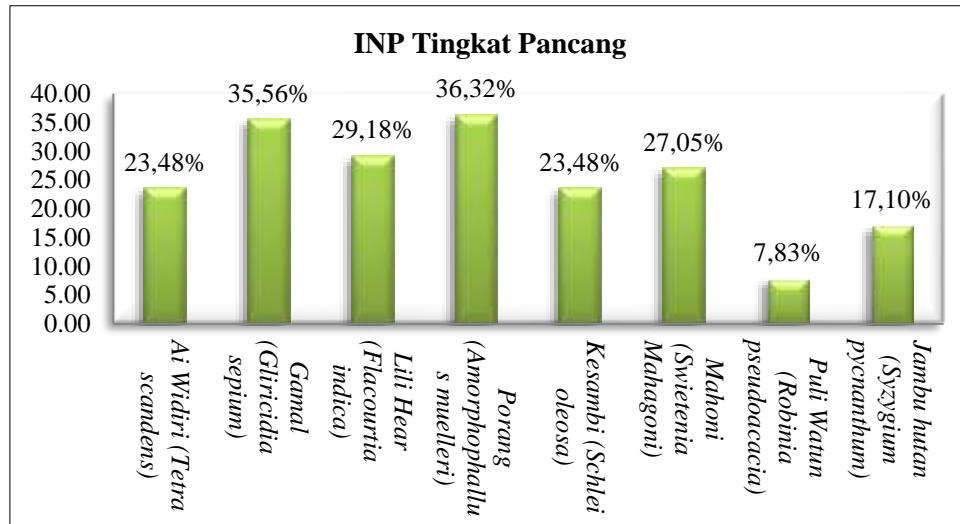
3. Analisis Vegetasi Tingkat Pancang

Hasil analisis pada gambar 6 menunjukkan bahwa tingkat pancang pada Hutan Ilinmedo didominasi oleh Porang (*Amorphophallus muelleri*) dengan INP sebesar yaitu 36,32%, disusul oleh Gamal (*Gliricidia sepium*) dengan INP 35,56%, Lili Hear (*Flacourtia indica*) dengan INP 29,18%, Mahoni (*Swietenia Mahagoni*) dengan INP 27,05%, Ai Widiri (*Tetra scandens*) dan Kesambi (*Schlei oleosa*) yang memiliki INP 23,48%, Jambu hutan (*Syzygium pycnanthum*) dengan INP 17,10% serta INP terkecil adalah Puli Watun (*Robinia pseudoacacia*) dengan nilai INP 7,83%.

Menurut Indriyani *et al.*, (2010) porang dapat bertumbuh pada tanah kering berhumus, ini sesuai dengan hasil observasi dan menurut masyarakat kawasan KPHKm mereka memiliki potensi dan penghasil umbi-umbian salah satunya adalah porang yang tumbuh secara liar tanpa ada pembudidayaan dari masyarakat. Namun sayangnya, pengelolaan dan pemanfaatan akan tanaman

porang pada kelompok KPHKm sampai saat ini belum ada.

Porang (*Amorphophallus muelleri*) dan Gamal (*Gliricidia sepium*) memiliki INP dengan selisih yang tidak jauh dan menjadi peran penting dalam struktur vegetasi pada tingkat tiang. Sedangkan spesies dengan INP yang rendah seperti Jambu Hutan (*Syzygium pycnanthum*) dan Puli Watun (*Robinia Pseudoacaci*) menunjukkan adanya variasi spesies meskipun tidak dominan. Berdasarkan analisis dan data perhitungan yang didapatkan, menunjukkan bahwa kondisi hutan pada tingkat tiang berada dalam tahap suksesi atau dalam tahap perbaikan. Nilai penting yang tinggi menunjukkan bahwa jenis tersebut mampu bersaing dengan lingkungannya, sedangkan nilai penting yang rendah menunjukkan bahwa jenis tersebut kurang mampu bersaing dengan lingkungannya. Jumlah jenis tersebut berkurang setiap tahun karena eksploitasi yang tinggi dan rendahnya ketahanan terhadap gejala alam (*Renta et al.*, 2016).

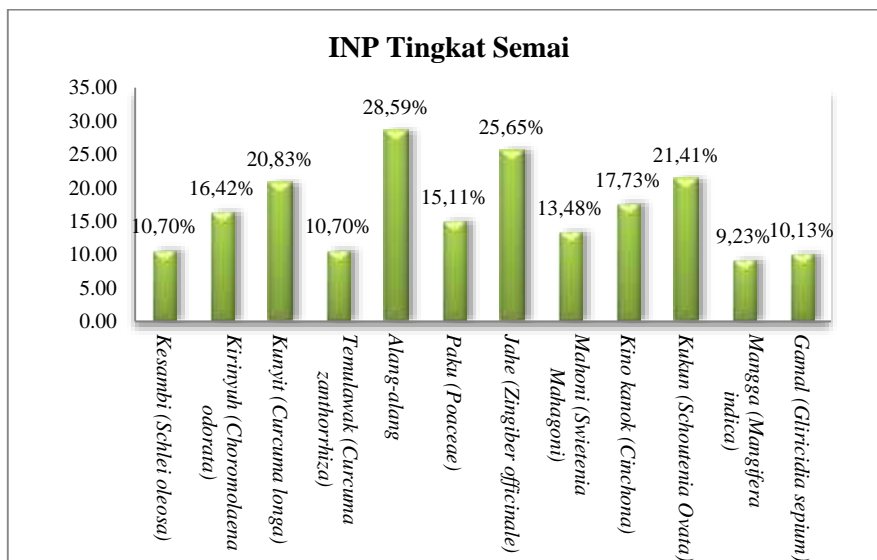


Gambar 6. Grafik INP Tingkat Pancang

4. Analisis Vegetasi Tingkat Semai

Menurut hasil analisis yang dilakukan pada dua belas plot pengamatan, terdapat tiga belas jenis tumbuhan dengan tingkat semai atau herba yang berbeda. Tumbuhan yang paling umum adalah alang-alang dengan nilai

INP sebesar 28,59%, disusul oleh Jahe (*Zingiber officinale*) dengan nilai INP 25,65%, lalu disusul oleh Kunyit (*Curcuma longa*) dengan nilai INP 20,83% dan tumbuhan dengan nilai INP terendah adalah Mangga (*Mangifera indica*) dengan nilai INP 9,13%.



Gambar 7. Grafik INP Tingkat Semai

Alang-alang merupakan jenis tanaman yang dapat tumbuh secara dominan karena cara berkembang biak yang dapat melalui angin atau rimpang serta yang memiliki kemampuan

adaptasi yang tinggi ini menjadi alasan pada kawasan KPHKm Buli Uher, hutan Ilinmedo tumbuhan herba didominasi Alang-alang (Jalaluddin, 2023).



Dominasi alang-alang menunjukkan hutan mengalami degradasi akibat aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola kawasan HKm dengan salah, seperti pembakaran, dan perambahan untuk membuka lahan pertanian. Alang-alang yang mendominasi dapat menghambat regenerasi spesies pohon asli dan mempengaruhi nilai ekologi HKm secara keseluruhan dan menunjukkan aktivitas pengelolaan HKm belum cukup untuk menekan dominansi alang-alang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di KPHKm Buli Uher diperoleh kesimpulan bahwa hasil evaluasi kinerja pengelolaan KPHKm Buli Uher dengan menggunakan variabel kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, tata kelola kawasan HKm, dan tata kelola usaha HKm maka penilaian dari empat variabel tersebut menghasilkan nilai 510 dan masuk dalam kriteria penilaian yang baik sesuai dengan kriteria dan kategori pedoman instrumen monitoring dan evaluasi PHBM.

Pengaruh pengelolaan HKm pada kondisi hutan di Hutan Lindung Ilinmedo mengalami penurunan yang disebabkan oleh penebangan dan pembakaran hutan yang dilakukan masyarakat untuk membuka lahan garapan. Ini dibuktikan dengan luas hutan pada tahun 2013 sebesar 124,00 Ha, tahun 2018 menjadi 138,66 Ha diakibatkan dari tidak terdapatnya kegiatan pengelolaan HKm pasca pengeluaran IUPHKM pada tahun 2013. Tahun 2023 terjadi penurunan yang signifikan sebesar 93,85 Ha yang disebabkan, adanya kegiatan pengelolaan kelompok pada tahun 2018 dan berdasarkan analisis vegetasi menunjukan kondisi hutan saat ini sedang dalam tahap perubahan atau perbaikan dari kerusakan yang pernah terjadi. Sehingga dari hasil analisis ini menunjukan perbedaan analisis dan ketidaksesuaian, antara hasil evaluasi kinerja kelompok dan hasil analisis tutupan lahan serta analisis vegetasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyari, S. M. (2022). *Buku Ajar Inventarisasi Sumberdaya Hutan (Perisalah Hutan)* (Issue 38).
- Dwi Sudarsono. (2016). *Panduan Monitoring Dan Evaluasi Phbm*. Diakses dari <https://Dooplayer.Info/68498805-Dwi-Sudarsono-Panduan-Monitoring-Dan-Evaluasi-Phbm.html>
- Frederik Reinardus Naiheli. (2022). *Struktur Dan Komposisi Serta Status Regenerasi Mamar Desa Beaneno, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka*. 8(2), 342–355.
- Idris, A. I., Rusmidin, & Mahfudz, M. (2023). *Keanekaragaman Dan Pemanfaatan Tumbuhan Bawah Pada Lahan Agroforestry Di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar*. *Pangale Journal Of Forestry And Environment*, 3(1), 38–48.
- Indriyani, S., Arisoesilaningsih, E., Wardiyati, T., & Purnobasuki, H. (2010). *Hubungan Faktor Lingkungan Habitat Porang (Amorphophallus Muelleri Blume) Pada Lima Agroforestri Di Jawa Timur Dengan Kandungan Oksalat Umbi*. *Academia Basic Science Seminar Vii*, May 2014, 1–10. Diakses dari https://Www.Academia.Edu/Download/42534122/Hubungan_Faktor_Lingkungan_Habitat_Poran20160210-15818-17u2jvx.Pdf
- Jalaluddin. (2023). *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*. *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, 2(Mei), 85–100.
- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. (2014). *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Nomor : P.88/Menhut-II/2014. Tentang. Hutan Kemasyarakatan*.
- Kph Sikka. (2023). *Rkps Kphkm Buli Uher*.
- Lenaini, I. (2021). *Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling*. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. P-Issn 2549-7332 %7c E-Issn 2614-1167%0d
- M. Iqbal. (2020). *Metode Mixed Methods*.
- Nandini, R. (2013). *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Di Pulau Lombok*. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 10(1), 43-55. Diakses dari <https://Doi.Org/10.20886/Jpht.2013.10.1.43-55>
- Renta, P. P., Pribadi, R., Zainuri, M., Angraini, M., & Utami, F. (2016). *Struktur Komunitas Mangrove Di Desa Mojo Kabupaten*. 1(2), 1–



10.
Reski, N. A., Yusran, Y., & Makkarennu, M. (2017). *Rancangan Pemberdayaan Masyarakat Pada Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Desa Pacekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan*. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 9(1), 37. Diakses dari <https://doi.org/10.24259/Jhm.V9i1.2039>
- Rizki Sanjaya. (2016). *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera Di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*. 13(3), 44–50.
- Rp Chandra. (2020). *Tutupan Lahan*. 14–34.
- Rulianto, A. (2018). *Analisis Vegetasi Dalam Upaya Pengembangan Wisata Di Taman Wisata Alam Punt Kayu Palembang Provinsi Sumatera Selatan*. *Bmc Microbiology*, 17(1), 1-14. Diakses dari <https://doi.org/10.1016/J.Biotechadv.2018.09.003>
<https://doi.org/10.1016/J.Bbamem.2015.10.011>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2710>
- Sainul Sanjaya. (2022). *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Lajoanging Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Sari, D. N., Wijaya, F., Mardana, M. A., & Hidayat, M. (2018). *Analisis Vegetasi Tumbuhan Bawah Dengan Metode Transek (Line Transect) Di Kawasan Hutan Deudap Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar*. *Prosiding Seminar Nasional Biotik*, 6(1), 165–173.
- Setiawan, F. (2020). *Lahan Kabupaten Bangka Selatan*. 209–213.
- Sulastri, W., Suhartoyo, H., & Yansen, Y. (2019). *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Dan Perubahan Tutupan Lahan Pada Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (Iuphkm) Desa Ujan Mas Atas Kabupaten Kepahiang*. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 8(1), 77-86. Diakses dari <https://doi.org/10.31186/Naturalis.8.1.9169>
- Tuakora, M. A. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Lindung Gunung Sirimau (The Factors That Influenced Land Cover Change In Gunung Sirimau Protected Forest Are)*. 16, 60–68.